



DINAMIKA PARTISIPASI DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KELURAHAN AFA-AFA KOTA TIDORE: Studi Kualitatif

Idham Taher^{1*}, Vhyda Hamidah Aulia Radjaloa¹

¹ Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Nuku Tidore

*Penulis Korespondensi, email: idhamtaher9046@gmail.com

Diserahkan: 03/03/2026

Direvisi: 03/16/2026

Diterima: 22/03/2026

Abstrak. Peningkatan volume sampah organik di wilayah kepulauan kecil menjadi tantangan serius dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengelolaan sampah organik, tingkat partisipasi masyarakat, serta tantangan sosial, teknis, dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Afa-Afa, Kota Tidore Kepulauan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, meliputi pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, serta rumah tangga. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengolahan sampah organik masih bersifat individual dan belum terorganisasi secara kolektif. Sebagian masyarakat memanfaatkan sampah organik melalui penguburan atau pakan ternak, namun pemilahan di sumber dan komposting sistematis belum berkembang. Tantangan utama berada pada aspek sosial (45%) berupa rendahnya kesadaran dan norma pemilahan sampah, diikuti tantangan teknis (35%) terkait keterbatasan fasilitas dan lahan, serta tantangan kelembagaan (20%) berupa belum optimalnya dukungan regulasi dan organisasi komunitas. Analisis menggunakan Arnstein's Ladder of Participation menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat berada pada level informing dan consultation, sehingga partisipasi masih bersifat tokenistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi lingkungan, pembentukan kelembagaan komunitas, serta kebijakan partisipatif menjadi kunci pengelolaan sampah organik berkelanjutan di wilayah kepulauan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi partisipasi masyarakat, dukungan kelembagaan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola sampah berbasis komunitas.

Kata Kunci: Sampah Organik; Partisipasi Masyarakat; CBSWM; Pembangunan Berkelanjutan, Wilayah Kepulauan.

Cara mensitasi: Taher I., Radjaloa V.H.A. (2026). Dinamika Partisipasi Dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Organik Di Kelurahan Afa-Afa Kota Tidore. *Agricentra: Jurnal Sains Agribisnis*, Vol 2 No. 1: Maret 2026 pp: 1-11.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah padat perkotaan merupakan isu global yang terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, percepatan urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Laporan *What a Waste 2.0* memperkirakan bahwa timbulan sampah global akan meningkat secara signifikan hingga tahun 2050 apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan terintegrasi (Kaza *et al.*, 2018). Di banyak negara berkembang, komposisi sampah didominasi oleh fraksi organik yang memiliki potensi besar menghasilkan emisi gas rumah kaca, khususnya metana, akibat proses dekomposisi anaerobik di tempat pembuangan akhir terbuka. Oleh karena itu, pengelolaan sampah organik tidak hanya menjadi persoalan teknis kebersihan lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan isu perubahan iklim dan keberlanjutan global.

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengelolaan sampah organik memiliki relevansi langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama SDG 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan, SDG 12 tentang pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim. Pendekatan ekonomi sirkular menawarkan paradigma baru dengan menekankan pemanfaatan kembali sampah organik menjadi kompos atau energi sebagai bagian dari sistem produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Strategi ini dinilai mampu menekan emisi, mengurangi beban TPA, serta meningkatkan ketahanan kota terhadap tekanan lingkungan (Fatimah *et al.*, 2020).

Pengelolaan sampah organik tidak hanya berkaitan dengan dimensi teknis pengolahan limbah, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat. Dalam perspektif ekologi politik lingkungan, praktik pengelolaan sampah sering kali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, distribusi tanggung jawab, serta kapasitas institusional yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat (Astoria & Heruman, 2016). Oleh karena itu, upaya transformasi sistem pengelolaan

sampah tidak dapat dilepaskan dari perubahan perilaku kolektif serta penguatan struktur kelembagaan lokal.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh faktor sosial seperti tingkat kepercayaan antarwarga, kepemimpinan lokal, serta keberadaan norma kolektif yang mendukung perilaku ramah lingkungan (Dhokhikah *et al.*, 2015). Dalam komunitas dengan modal sosial yang kuat, praktik pengelolaan sampah cenderung berkembang lebih berkelanjutan karena adanya mekanisme kontrol sosial dan solidaritas komunitas. Sebaliknya, pada masyarakat yang belum memiliki kelembagaan komunitas yang kuat, program pengelolaan sampah seringkali bergantung pada intervensi pemerintah dan tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.

Wilayah kepulauan memiliki karakteristik ekologis dan spasial yang berbeda dengan wilayah daratan besar. Keterbatasan lahan untuk tempat pembuangan akhir, tingginya biaya transportasi logistik, serta kerentanan ekosistem pesisir terhadap pencemaran menjadikan pengelolaan sampah sebagai isu strategis dalam pembangunan wilayah kepulauan (Kaza *et al.*, 2018). Kondisi ini menuntut pendekatan pengelolaan yang lebih adaptif dan berbasis lokal, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam proses pengurangan dan pengolahan sampah.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, tantangan tersebut semakin kompleks karena distribusi infrastruktur pengelolaan sampah yang belum merata antarwilayah. Banyak kota kecil dan daerah kepulauan masih bergantung pada sistem pengangkutan sampah konvensional yang berorientasi pada pembuangan akhir. Pendekatan ini tidak hanya menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan biaya operasional pengelolaan sampah bagi pemerintah daerah.

Pada tingkat nasional, tantangan pengelolaan sampah di Indonesia masih cukup kompleks. Komposisi sampah rumah tangga di Indonesia didominasi oleh bahan organik dengan kisaran 50–60%, namun sistem pengelolaannya masih cenderung menggunakan pola konvensional kumpul–angkut–buang tanpa pengolahan optimal di tingkat sumber (Purba *et al.*, 2014). Model pengelolaan yang terpusat seringkali tidak efektif, terutama di kota kecil dan wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan lahan, infrastruktur, serta kapasitas kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis semata tidak cukup untuk menjawab persoalan yang bersifat multidimensional.

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, pendekatan *Community-Based Solid Waste Management* (CBSWM) berkembang dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah. Penelitian Dhokhikah *et al.* (2015) menunjukkan bahwa keberhasilan pengurangan sampah rumah tangga sangat dipengaruhi oleh norma sosial, kepemimpinan lokal, serta keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Temuan serupa disampaikan oleh Wijayanti dan Suryani (2015) yang menegaskan bahwa tata kelola lingkungan berbasis komunitas mampu meningkatkan keberlanjutan program melalui penguatan modal sosial dan kolaborasi antarwarga. Meskipun demikian, berbagai penelitian juga mengungkapkan adanya hambatan berupa rendahnya konsistensi partisipasi, lemahnya kelembagaan lokal, serta keterbatasan dukungan teknis dan pendanaan (Mahyudin, 2017; Asteria & Heruman, 2016).

Dalam menganalisis partisipasi masyarakat, penelitian ini menggunakan teori *Arnstein's Ladder of Citizen Participation* sebagai kerangka analitis utama. Arnstein (1969) mengklasifikasikan partisipasi ke dalam delapan tingkatan, mulai dari manipulasi hingga kendali warga (*citizen control*), yang mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki kekuasaan nyata dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kerangka ini relevan untuk menilai apakah masyarakat dalam pengelolaan sampah organik berperan sebagai objek kebijakan atau sebagai subjek yang memiliki kontrol substantif. Studi kontemporer menunjukkan bahwa partisipasi yang bersifat substantif, bukan sekadar simbolik, berkontribusi signifikan terhadap ketahanan kebijakan pengelolaan sampah, terutama pada komunitas pesisir dan kepulauan (Suryawan & Lee, 2025).

Konteks wilayah kepulauan dan kota kecil menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah. Keterbatasan lahan untuk TPA, tingginya biaya transportasi logistik, minimnya fasilitas pengolahan, serta kerentanan ekosistem pesisir terhadap pencemaran menjadi faktor yang memperumit sistem pengelolaan sampah. Namun demikian, struktur sosial masyarakat kepulauan yang cenderung komunal sebenarnya menyimpan potensi modal sosial yang kuat. Penelitian Singgalen *et al.* (2019) di

Maluku Utara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan berbasis lokal, sehingga pendekatan berbasis komunitas memiliki peluang besar untuk dioptimalkan dalam pengelolaan sampah.

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah kepulauan menghadapi kondisi serupa, di mana sistem pengelolaan sampah masih didominasi pola *collect-transport-dispose*. Sampah rumah tangga yang sebagian besar berupa bahan organik belum sepenuhnya dipilah sejak dari sumbernya, dan praktik pengolahan seperti komposting rumah tangga atau skala komunitas belum terdokumentasi secara komprehensif dalam kajian akademik. Secara khusus, di Kelurahan Afa-Afa belum terdapat penelitian yang secara mendalam mengkaji praktik pengolahan sampah organik, tantangan sosial dan struktural yang dihadapi masyarakat, serta tingkat partisipasi warga berdasarkan kerangka teoritis partisipasi.

Telaah literatur menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang cukup jelas. Sebagian besar studi pengelolaan sampah di Indonesia masih berfokus pada kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta, dengan pendekatan yang lebih dominan kuantitatif. Penelitian yang secara eksplisit menggunakan kerangka Arnstein dalam konteks pengelolaan sampah organik masih terbatas, terlebih lagi pada wilayah kepulauan kecil seperti Tidore Kepulauan. Selain itu, integrasi antara teori CBSWM dan perspektif pembangunan berkelanjutan dalam studi lokal belum banyak dilakukan secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian kualitatif yang kontekstual untuk mengeksplorasi dinamika praktik, tantangan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah organik di tingkat kelurahan kepulauan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik pengolahan sampah organik di Kelurahan Afa-Afa, menganalisis tantangan sosial, teknis, dan kelembagaan yang dihadapi, mengkaji tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan kerangka *Arnstein's Ladder of Participation*, serta merumuskan rekomendasi penguatan pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Afa-Afa, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Wilayah ini dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik sebagai permukiman perkotaan di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan pengelolaan sampah domestik, khususnya sampah organik rumah tangga. Selain itu, hingga saat penelitian ini dilakukan, belum terdapat kajian akademik yang secara khusus menganalisis dinamika partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah organik di wilayah tersebut.

Kegiatan penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian. Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lingkungan permukiman serta wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan dalam aktivitas pengelolaan sampah.

Alur Penelitian



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif untuk menganalisis praktik, dinamika, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah organik di Kelurahan Afa-Afa, Kota Tidore Kepulauan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami realitas sosial secara mendalam melalui perspektif aktor yang terlibat langsung dalam praktik pengelolaan sampah, bukan sekadar mengukur variabel secara statistik. Dalam tradisi penelitian kualitatif, makna, pengalaman, serta konstruksi sosial masyarakat menjadi fokus utama analisis (Creswell & Poth, 2018). Desain deskriptif-interpretatif memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menafsirkan dinamika partisipasi yang terbentuk dalam konteks sosial lokal.

Kerangka analisis partisipasi masyarakat mengacu pada konsep *Arnstein's Ladder of Participation* yang mengklasifikasikan tingkat keterlibatan warga dari bentuk partisipasi semu hingga kontrol warga (Arnstein, 1969). Kerangka ini digunakan untuk mengidentifikasi posisi partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah organik di tingkat kelurahan. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi perspektif *Community-Based Solid Waste Management (CBSWM)*, yang menekankan pentingnya inisiatif dan kepemilikan komunitas dalam pengelolaan sampah berkelanjutan (Dhokhikah *et al.*, 2015). Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap kualitas partisipasi masyarakat.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas pengelolaan sampah organik (Patton, 2015). Informan mencakup unsur pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga sebagai produsen utama sampah organik domestik, serta kelompok swadaya atau pengelola sampah. Strategi ini dipilih untuk memastikan kedalaman data dan representasi perspektif yang beragam dalam struktur sosial masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif guna menangkap praktik aktual dan interaksi sosial yang terjadi, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen kebijakan, laporan program, dan regulasi terkait. Penggunaan multi-teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperkaya konteks empiris dan memperkuat validitas temuan, sebagaimana dianjurkan dalam studi pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Wijayanti & Suryani, 2015).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang berlangsung secara siklik melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui proses pengkodean tematik untuk mengidentifikasi pola partisipasi, bentuk praktik pengolahan, serta hambatan struktural dan kultural. Data yang telah dikodekan kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis dan matriks tematik untuk memudahkan penarikan makna. Proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian untuk menjaga konsistensi interpretasi dan menghindari bias peneliti.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi antar-informan serta menguji konsistensi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan sehingga hasil penelitian tidak hanya merefleksikan persepsi individual, tetapi menggambarkan konstruksi sosial yang lebih komprehensif dalam konteks pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat di wilayah kepulauan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sosial-Geografis dan Struktur Pengelolaan Sampah

Kelurahan Afa-Afa berada dalam konteks wilayah kepulauan dengan karakteristik spasial terbatas, akses infrastruktur yang belum optimal, serta ketergantungan pada sistem pengangkutan eksternal. Kondisi geografis tersebut secara struktural memengaruhi tata kelola sampah lokal. Dalam literatur global, wilayah kepulauan kecil umumnya menghadapi keterbatasan lahan TPA, tingginya biaya logistik, serta minimnya kapasitas teknologi pengolahan (Kaza *et al.*, 2018).

Secara demografis, produksi sampah rumah tangga di Kelurahan Afa-Afa didominasi oleh sampah organik yang berasal dari aktivitas konsumsi harian. Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah yang berlaku masih berorientasi pada pendekatan linear (kumpul–angkut–buang),

Tantangan Sosial, teknis dan kelembagaan

Berdasarkan hasil reduksi dan kategorisasi data, tantangan sosial menempati proporsi terbesar (45%). Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan utama pengelolaan sampah organik di Kelurahan Afa-Afa bukan semata pada aspek teknis, melainkan pada dimensi perilaku, kesadaran, dan konstruksi sosial masyarakat terhadap sampah. Rendahnya praktik pemilahan di sumber serta persepsi bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah menjadi faktor dominan.

Tantangan teknis (35%) mencerminkan keterbatasan fasilitas komposting, sarana pemilahan, serta keterbatasan lahan—karakteristik yang umum ditemukan pada wilayah kepulauan kecil. Sementara itu, tantangan kelembagaan (20%) menunjukkan belum optimalnya dukungan regulasi, koordinasi antarlevel pemerintahan, serta minimnya skema insentif berbasis komunitas.

Distribusi ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan seharusnya memprioritaskan pendekatan sosial-partisipatif sebelum investasi teknis berskala besar. Dalam perspektif CBSWM dan Arnstein (1969), penguatan kapasitas dan redistribusi peran masyarakat menjadi prasyarat transformasi menuju sistem yang lebih berkelanjutan.

Analisis Partisipasi Masyarakat Berdasarkan *Arnstein's Ladder*

Analisis menggunakan teori *Arnstein's Ladder of Citizen Participation* (Arnstein, 1969) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Afa-Afa masih berada pada level informing dan sebagian consultation.

Belum terdapat bukti partisipasi pada tingkat partnership, delegated power, maupun citizen control. Dengan demikian, partisipasi masih tergolong tokenism dan belum mencapai redistribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Dhokhikah *et al.* (2015) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi menuju kemitraan memerlukan kepemimpinan lokal yang kuat serta internalisasi norma lingkungan. Dalam konteks Kelurahan Afa-Afa, potensi modal sosial sebenarnya tersedia, namun belum dimobilisasi secara sistematis.

Dinamika Modal Sosial dalam Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Afa-Afa memiliki potensi modal sosial yang cukup kuat dalam bentuk hubungan kekerabatan, praktik gotong royong, serta solidaritas komunitas. Dalam teori pembangunan berbasis komunitas, modal sosial berperan sebagai sumber daya kolektif yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (Singgalen *et al.*, 2019).

Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terartikulasikan dalam bentuk kelembagaan formal yang mampu mengorganisasi aktivitas pengelolaan sampah secara sistematis. Ketidakhadiran struktur organisasi komunitas seperti kelompok komposting atau bank sampah menyebabkan praktik pengolahan sampah masih bersifat individual dan sporadis. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan modal sosial saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan program lingkungan apabila tidak diikuti oleh proses institusionalisasi yang jelas.

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Dhokhikah *et al.* (2015) di Surabaya yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga sangat dipengaruhi oleh norma sosial dan kepemimpinan lokal. Namun demikian, berbeda dengan konteks kota besar yang memiliki dukungan infrastruktur lebih baik, wilayah kepulauan seperti Tidore menghadapi keterbatasan fasilitas pengolahan yang lebih signifikan.

Selain itu, penelitian Wijayanti dan Suryani (2015) mengenai bank sampah di Surabaya menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak hanya bergantung pada partisipasi warga, tetapi juga pada keberadaan sistem insentif ekonomi yang mendorong keberlanjutan program. Dalam konteks Kelurahan Afa-Afa, mekanisme insentif semacam ini belum berkembang sehingga motivasi partisipasi masyarakat masih bersifat normatif dan belum terintegrasi dengan manfaat ekonomi.

Secara umum, temuan penelitian ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi sosial dan kekuatan kelembagaan komunitas. Penelitian Dhokhikah *et al.* (2015) di Surabaya

menunjukkan bahwa keberhasilan program pengurangan sampah rumah tangga sangat berkaitan dengan pembentukan norma sosial yang mendukung praktik pemilahan sampah. Hasil penelitian di Kelurahan Afa-Afa menunjukkan pola yang serupa, di mana ketiadaan norma kolektif mengenai pemilahan sampah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan sampah organik.

Namun demikian, terdapat perbedaan kontekstual yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan besar dan wilayah kepulauan kecil. Pada kota besar, pengelolaan sampah berbasis masyarakat umumnya didukung oleh infrastruktur yang lebih memadai serta program pemerintah yang relatif lebih terstruktur. Sebaliknya, di wilayah kepulauan seperti Kota Tidore Kepulauan, keterbatasan fasilitas pengolahan dan kapasitas kelembagaan lokal menjadi tantangan tambahan yang memengaruhi efektivitas sistem pengelolaan sampah.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa dinamika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial, tetapi juga oleh konteks geografis dan kelembagaan wilayah. Perspektif ini memperkaya literatur mengenai pengelolaan sampah berbasis komunitas, khususnya pada wilayah kepulauan yang masih relatif jarang dikaji dalam studi akademik di Indonesia.

Faktor Sosial yang Mempengaruhi Dinamika Partisipasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya praktik pemilahan dan pengolahan sampah organik tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan fasilitas teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks komunitas lokal, perilaku pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh persepsi kolektif mengenai tanggung jawab lingkungan. Sebagian masyarakat masih memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab utama pemerintah, sehingga inisiatif komunitas dalam pengolahan sampah organik belum berkembang secara optimal.

Dalam perspektif teori partisipasi masyarakat, kondisi tersebut mencerminkan belum terbentuknya internalisasi nilai lingkungan dalam praktik sosial sehari-hari. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi yang bersifat informatif dan konsultatif sering kali belum mampu menghasilkan perubahan perilaku kolektif yang berkelanjutan. Partisipasi pada tingkat tersebut masih bersifat simbolik karena masyarakat belum memiliki peran nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Selain faktor persepsi tanggung jawab, dinamika kepemimpinan lokal juga berperan penting dalam memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Studi mengenai pengelolaan lingkungan berbasis komunitas menunjukkan bahwa keberadaan tokoh lokal atau pemimpin informal sering menjadi faktor pendorong munculnya inisiatif kolektif dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Dalam konteks Kelurahan Afa-Afa, potensi kepemimpinan lokal sebenarnya tersedia, namun belum sepenuhnya dimobilisasi untuk mengorganisasi aktivitas pengelolaan sampah secara kolektif.

Faktor lain yang turut memengaruhi praktik pengelolaan sampah organik adalah keterbatasan pengetahuan teknis masyarakat mengenai metode pengolahan sampah yang sederhana dan aplikatif. Meskipun sebagian masyarakat memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pemahaman mengenai teknik komposting rumah tangga atau pemanfaatan sampah organik sebagai sumber daya produktif masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi lingkungan menjadi aspek penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Sintesis Teoretis dan Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan sampah organik di Kelurahan Afa-Afa tidak dapat dipahami secara parsial hanya dari aspek teknis, melainkan harus dianalisis melalui integrasi dimensi partisipasi, kelembagaan komunitas, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif Arnstein (1969), tingkat partisipasi masyarakat yang masih berada pada spektrum informing dan sebagian consultation menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sampah belum terdistribusi secara seimbang. Partisipasi yang bersifat tokenistik membatasi ruang masyarakat untuk berkontribusi secara substantif dalam perencanaan maupun pengawasan sistem pengelolaan sampah organik.

Dalam kerangka *Community-Based Solid Waste Management* (CBSWM), kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dimensi kelembagaan komunitas belum terinstitusionalisasi secara kuat. Meskipun terdapat modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas lokal, belum terbentuk mekanisme kolektif yang terstruktur, seperti kelompok komposting atau sistem pengelolaan berbasis RT yang berkelanjutan. Ketidakhadiran struktur kelembagaan yang jelas menghambat transformasi praktik individual menjadi gerakan kolektif yang sistematis. Dengan demikian, secara teoretis dapat disimpulkan bahwa efektivitas teknis pengolahan sampah organik sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi dan institusionalisasi komunitas, bukan semata oleh ketersediaan sarana fisik.

Lebih lanjut, integrasi dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sampah organik di Kelurahan Afa-Afa belum sepenuhnya mendukung prinsip ekonomi sirkular dan pengurangan emisi yang menjadi bagian dari agenda SDG 11, SDG 12, dan SDG 13. Meskipun terdapat potensi pemanfaatan kompos sebagai produk bernilai tambah, absennya mekanisme insentif dan dukungan kebijakan menyebabkan potensi tersebut belum berkembang. Sintesis ini menegaskan bahwa keberlanjutan sistem pengelolaan sampah organik memerlukan sinergi antara redistribusi kekuasaan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, dan integrasi kebijakan berbasis prinsip keberlanjutan.

Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan bagi pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan, khususnya pada tingkat kelurahan. Pertama, diperlukan penguatan regulasi lokal yang secara eksplisit mendorong pemilahan sampah organik di sumber sebagai kewajiban kolektif, bukan sekadar anjuran administratif. Regulasi tersebut idealnya diiringi dengan mekanisme pengawasan partisipatif sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek pengelolaan lingkungan.

Selain itu, strategi kebijakan perlu diarahkan pada pengembangan model komposting skala mikro berbasis komunitas yang adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan. Pendekatan ini lebih realistis dibandingkan investasi teknologi berskala besar yang memerlukan biaya tinggi dan infrastruktur kompleks. Integrasi program pengelolaan sampah dengan pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pemanfaatan kompos untuk pertanian pekarangan, dapat memperkuat insentif partisipasi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal.

Penguatan literasi lingkungan berbasis komunitas juga menjadi aspek krusial dalam mendorong perubahan perilaku. Intervensi edukatif yang berkelanjutan, melibatkan tokoh masyarakat dan kelompok perempuan, berpotensi meningkatkan internalisasi nilai keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jangka panjang, transformasi menuju sistem pengelolaan sampah organik yang partisipatif dan berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila pemerintah daerah mampu membangun kemitraan sejati dengan masyarakat, bukan sekadar menyampaikan informasi atau melakukan konsultasi simbolik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah organik di wilayah kepulauan kecil seperti Kelurahan Afa-Afa sangat bergantung pada integrasi kebijakan partisipatif, penguatan kelembagaan lokal, dan komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Tanpa transformasi pada dimensi tersebut, sistem pengelolaan sampah akan tetap berada pada pola administratif yang reaktif dan belum mampu menghasilkan dampak ekologis maupun sosial yang signifikan.

Selain implikasi ilmiah dan praktis, temuan penelitian ini juga memiliki relevansi penting bagi perumusan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan pendekatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur pengangkutan sampah, tetapi juga pada penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Pengembangan kebijakan pemilahan sampah rumah tangga dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Kebijakan tersebut idealnya diintegrasikan dengan program edukasi lingkungan serta dukungan teknis bagi masyarakat dalam mengembangkan praktik komposting skala rumah tangga atau komunitas. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan beban sistem pengelolaan sampah kota, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi dari pemanfaatan kompos sebagai produk pertanian.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mendorong pembentukan kelembagaan komunitas seperti kelompok pengelola sampah atau bank sampah sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola lingkungan berbasis masyarakat. Kelembagaan lokal semacam ini berperan penting dalam mengorganisasi partisipasi warga sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

Implikasi Ilmiah

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan menyoroti dinamika partisipasi dalam konteks wilayah kepulauan kecil. Integrasi antara teori Arnstein's Ladder of Participation dan konsep *Community-Based Solid Waste Management* (CBSWM) memberikan perspektif analitis yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan lingkungan. Temuan penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai tata kelola lingkungan berbasis komunitas di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku Utara yang masih relatif jarang menjadi lokasi studi empiris.

Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pengelolaan sampah organik di tingkat kelurahan memerlukan strategi intervensi yang berfokus pada perubahan perilaku masyarakat serta penguatan kelembagaan lokal. Program edukasi lingkungan, pembentukan kelompok pengelola sampah, serta pengembangan komposting skala rumah tangga dapat menjadi langkah awal menuju sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, integrasi pengolahan sampah organik dengan kegiatan pertanian pekarangan atau urban farming berpotensi meningkatkan nilai ekonomi kompos sekaligus memperkuat insentif partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah organik di Kelurahan Afa-Afa masih berada pada tahap transisi menuju sistem berbasis masyarakat yang lebih berkelanjutan. Praktik pengolahan sampah yang berkembang masih didominasi oleh inisiatif individual dan belum terinstitusionalisasi dalam bentuk kelembagaan komunitas yang terstruktur. Tantangan sosial, khususnya terkait kesadaran dan perilaku pemilahan sampah, menjadi faktor dominan yang memengaruhi efektivitas sistem pengelolaan sampah organik.

Analisis menggunakan kerangka *Arnstein's Ladder of Participation* menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat informing dan consultation. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum memiliki peran substantif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah. Dalam perspektif *Community-Based Solid Waste Management* (CBSWM), lemahnya kelembagaan komunitas menjadi faktor pembatas transformasi praktik pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih kolektif dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah organik pada konteks wilayah kepulauan kecil. Dengan menggunakan kerangka analisis *Arnstein's Ladder of Participation* dan perspektif *Community-Based Solid Waste Management*, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi masyarakat dan kekuatan kelembagaan komunitas.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi menuju sistem pengelolaan sampah organik yang berkelanjutan memerlukan perubahan paradigma dari pendekatan administratif yang bersifat top-down menuju model tata kelola lingkungan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pengembangan strategi pengelolaan sampah berbasis komunitas yang lebih adaptif terhadap karakteristik sosial dan geografis wilayah kepulauan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah organik di wilayah kepulauan kecil sangat bergantung pada integrasi antara partisipasi masyarakat, penguatan

kelembagaan lokal, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Upaya transformasi menuju sistem pengelolaan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan partisipatif yang mampu mendorong redistribusi peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 136–141. <https://doi.org/10.22146/jml.18783>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dhokhikah, Y., Trihadiningrum, Y., & Sunaryo, S. (2015). *Community participation in household solid waste reduction in Surabaya, Indonesia*. *Resources, Conservation and Recycling*, 102, 153–162. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.06.013>
- Fatimah, Y. A., Govindan, K., Murniningsih, R., & Setiawan, A. (2020). *Circular economy approach for organic waste management in Indonesia*. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 22, 1550–1562. <https://doi.org/10.1007/s10163-020-01048-7>
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*. *World Bank*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317>
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di Indonesia. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), 66–74.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Purba, H. D., Meidiana, C., & Adrianto, D. W. (2014). *Municipal solid waste management in Indonesia: Status and challenges*. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 16(3), 391–399. <https://doi.org/10.1007/s10163-013-0174-z>
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G., & Wiloso, P. G. (2019). *Community participation in regional development*. *Journal of Regional and City Planning*. <https://hal.science/hal-02342716>
- Suryawan, I. W. K., & Lee, C. H. (2025). *Green transition management: The key role of community participation in developing resilient waste management policies for coastal and inland communities*. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-025-36185-x>
- Wijayanti, D. R., & Suryani, S. (2015). *Waste bank as community-based environmental governance: A lesson learned from Surabaya*. *Procedia Environmental Sciences*, 23, 171–179. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.01.026>